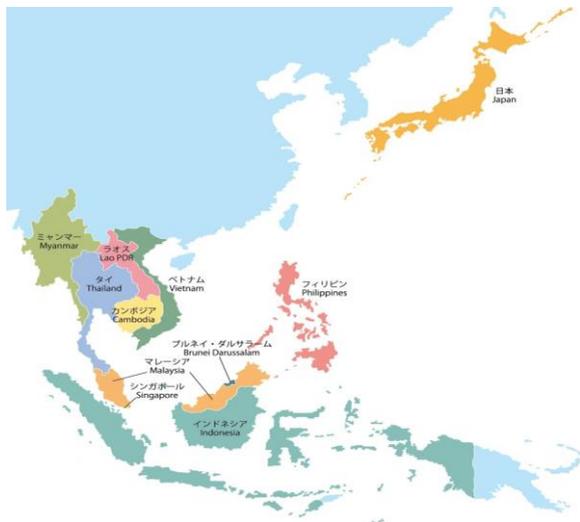


BAB II

Hubungan antara Jepang dengan Asia Tenggara (ASEAN) melalui *Fukuda Doctrine*

Membahas hubungan antara Jepang dengan Asia Tenggara bisa dibilang sudah melalui sejarah yang sangat panjang. Di mulai semenjak perang dunia kedua yang dimana Jepang menjajah beberapa Negara yang ada di Asia Tenggara pada masa tersebut. Sehingga mengakibatkan trauma mendalam bagi warga negara Asia Tenggara terutama negara-negara bekas jajahan Jepang yang mengakibatkan hubungan antara Jepang dengan Asia Tenggara menjadi renggang.

Gambar 2. 1 Peta Jepang dan ASEAN



Sumber: Google.com

Kemudian untuk membangun kembali hubungan dengan Asia Tenggara dibentuklah yang namanya *Fukuda Doctrine* sebagai jembatan Jepang untuk memperbaiki hubungan dengan Asia Tenggara terutama negara-negara anggota ASEAN. Di dalam bab ini penulis akan membahas mengenai bagaimana awal mula *Fukuda Doctrine* itu lahir, kemudian menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama antara Jepang pasca terbentuknya *Fukuda Doctrine*. Namun terlebih dahulu penulis akan menjelaskan bagaimana sejarah antara hubungan antara Jepang dan Asia Tenggara.

A. Sejarah Hubungan antara Jepang dan Asia Tenggara

Hubungan Jepang-Asia Tenggara selalu rumit, yang mana melibatkan kepentingan material dan antagonisme historis atau kejahatan dimasa lalu. Di satu sisi, Asia Tenggara secara strategis penting bagi Jepang untuk sumber daya alam dan jalur komunikasi laut (SLOC). Salah satu alasan mengapa Angkatan Laut Kekaisaran Jepang maju ke selatan selama tahun 1930-an yakni untuk mengamankan sumber daya alam dan memastikan swasembada Jepang tercukupi, bahkan dengan risiko peregangan militer yang berlebihan, karena kurangnya minyak dan gas alam Jepang. Bahkan setelah kekalahannya dalam Perang Dunia II, Jepang masih menganggap Asia Tenggara sebagai tumpuan strategis yang penting bagi wilayah yang lebih luas.

Jepang bergantung pada minyak impor dari Timur Tengah; sekitar 80 persen impor minyaknya berasal dari Teluk Persia dan melewati Laut Cina Selatan. Gangguan pada SLOC ini akan menciptakan krisis ekonomi yang parah bagi Jepang. Untuk mengurangi risiko ini, pada tahun 1981 Perdana Menteri Zenko Suzuki mengusulkan rencana untuk mempertahankan SLOC

Jepang hingga 1.000 mil laut. Strategi pertahanan ini kemudian ditingkatkan oleh Perdana Menteri Yasuhiro Nakasone. Meskipun postur pertahanan Tokyo yang sangat hati-hati di era pasca perang, rencana semacam itu menjadi lebih menarik pada tahun 1970-an ketika minyak impor bisa memenuhi setengah dari kebutuhan negara. Pemerintah juga semakin memahami pentingnya guncangan sosial-ekonomi ketika Jepang mengalami krisis minyak tahun 1973 dan 1979. Meskipun jarak 1.000 mil laut hanya meluas hingga ke Bashi Channel (utara Filipina) dan Jepang tidak punya niat untuk memproyeksikan kekuatan ke Asia Tenggara, kawasan itu tetap penting bagi keamanan Jepang.

Di sisi lain, negara-negara Asia Tenggara memiliki ingatan nasional kolektif tentang kolonisasi Jepang. Karena ketegasan Cina dan Korea Selatan, perhatian internasional pada "isu sejarah" Asia terlalu sering dan hanya berfokus pada Asia Timur Laut; namun, Asia Tenggara memiliki pengalamannya sendiri dengan imperialisme Jepang dan Eropa. Salah satu alasan peninggalan bersejarah dari Perang Dunia II yang ada di Asia Tenggara tidak begitu menarik perhatian karena telah mencapai tingkat tertentu dalam hal rekonsiliasi antara Jepang dan negara-negara yang ada Asia Tenggara. Memang, disisi lain Asia Tenggara tentu saja memiliki pandangan negatif tentang sejarah kolonialisme Jepang, secara umum Asia Tenggara memiliki sikap positif terhadap perkembangan politik dan ekonomi Jepang yang cepat pada periode Meiji dan kemenangan Jepang pada Perang Rusia-Jepang di tahun 1904-1905.¹⁶ Meskipun tingkat antagonisme historis bervariasi bagi

mereka yang mengalami perang dengan Jepang (misalnya, Filipina, Malaysia, dan Singapura) dibandingkan dengan mereka yang hanya mengalami pendudukan tidak langsung (Thailand dan Vietnam) dan mereka yang memperoleh kemerdekaan dengan bantuan Jepang (Indonesia), mereka semua berbagi apresiasi atas bagaimana ekspansi kekaisaran Jepang memicu "Pembebasan dari Barat".¹⁷ Namun, terlepas dari ikatan ekonomi dan politik yang kuat antara Jepang dan Asia Tenggara, ingatan bersama mereka tentang perang masih tercermin dalam buku teks sejarah, yang berisi pandangan negatif tentang penjajahan Jepang secara langsung maupun tidak langsung - seperti bagaimana penduduk setempat menderita akibat kehancuran perang, kekurangan makanan, dan kebijakan imperialisme Jepang lainnya, termasuk apa yang disebut kebijakan Japanisasi.¹⁸

Dalam konteks ini, setelah kekalahannya, Jepang berusaha mengubah hubungannya dengan negara-negara Asia Tenggara melalui cara ekonomi dan politik. Pertama, Jepang memberikan bantuan ekonomi kepada negara-negara Asia Tenggara setelah Perjanjian Damai San Francisco 1951. Para korban perang yang berpartisipasi dalam proses perjanjian menikmati hak untuk meminta kompensasi perang, termasuk reparasi. Filipina dan

¹⁶ Takeshi Kubota, "The Image of Japan and the Japanese by the People of Southeast Asia During the Japanese Military Occupation from 1941 to 1945", Japan Professional School of Education, 2013, hal. 1-25.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

Vietnam Selatan melakukannya. Myanmar tidak memenuhi syarat karena menolak untuk berpartisipasi dalam proses perjanjian damai, tetapi Jepang masih memperpanjang perjanjian bilateral untuk mencakup pemulihan perang dan bantuan ekonomi. Jepang juga memberikan kompensasi kepada Indonesia meskipun Indonesia tidak meratifikasi perjanjian damai tersebut. Selain itu, Jepang dengan cepat menawarkan bantuan kepada Laos dan Kamboja meskipun mereka melepaskan hak atas reparasi. Jepang juga membantu orang Tionghoa perantauan di Singapura dan Malaysia; pada saat itu wilayah-wilayah ini masih menjadi bagian dari Britania Raya, yang juga melepaskan hak atas reparasi. Sementara bervariasi di berbagai negara Asia Tenggara, Jepang menggunakan "reparasi semu" ini (*jun baisho*) untuk memperbaiki hubungan ekonomi dan politiknya dengan kawasan tersebut.

Sehingga pada tahun 1954 muncul *Yoshida Doctrine* yang dimana doktrin tersebut dinamai berdasarkan nama dari Yoshida Shigeru yang tidak lain adalah perdana menteri Jepang dari 1946-7 dan 1948-54. Sebagai seorang diplomat yang berprofesi, Yoshida adalah salah satu politisi paling berpengaruh di Jepang pascaperang. Dia berhasil menyelesaikan Perjanjian Damai San Francisco yang memulihkan kedaulatan Jepang. Visinya, dengan perpaduan antara pragmatisme dan realisme, adalah faktor penting dalam kebangkitan kembali Jepang sebagai kekuatan besar. Selama bertahun-tahun, administrasi yang berhasil telah menyempurnakan doktrin untuk mencerminkan urgensi saat ini dengan masuknya konsekuensi wajar yang menonjol seperti kebijakan non-nuklir dan larangan ekspor senjata. Para penganut seperti Nakasone Yasuhiro menemukan upaya mereka untuk mempersenjatai kembali dan memperluas

komitmen keamanan internasional Jepang yang dihancurkan oleh doktrin Yoshida yang sudah mengakar. Tiga prinsip doktrin Yoshida adalah sebagai berikut.

- a) Rehabilitasi ekonomi Jepang harus menjadi tujuan utama nasional. Ekonomi politik kerja sama dengan Amerika Serikat diperlukan untuk tujuan ini.
- b) Jepang harus tetap bersenjata ringan dan menghindari keterlibatan dalam internasional masalah politik-strategis. Sikap rendah ini tidak hanya akan membebaskan energi rakyatnya untuk pengembangan industri yang produktif, tetapi juga menghindari internal yang berjuang untuk memecah belah.
- c) Untuk mendapatkan jaminan jangka panjang untuk keamanannya sendiri, Jepang akan menyediakan pangkalan untuk angkatan darat, laut, dan udara AS.¹⁹

Setelah upacara diplomatik yang terkait dengan penyerahan Pasukan Sekutu, para pemimpin Jepang harus bergulat dengan kenyataan bagaimana membangun kembali negara yang tealah dilanda perang dan untuk mengembalikan

¹⁹ Tang Siew Man, *“Japan’s Grand Strategic Shift from Yoshida to Koizumi: Reflections on Japan’s Strategic Focus in the 21st Century”*. Akademik 70, 2007, hal. 118-119.

semangat masyarakat yang di hasilkan dari dampak perang tersebut. Tantangan langsung bagi Jepang adalah, bukan masalah mendapatkan kembali kekuasaan dan statusnya di komunitas internasional, tetapi lebih ke masalah duniawi seperti pakaian, memberi makan dan mengamankan warganya. Itulah tujuan-tujuan besar yang ingin dicapai oleh tujuan strategis besar dari doktrin Yoshida.²⁰

Pada tahun-tahun pertama periode pasca perang, Jepang selamat akibat bantuan AS yang menyediakan banyak makanan dan bantuan moneter. Sumber daya Jepang menjadi merengang akibat enam juta tentara dan warga sipil yang kembali dari Asia. Yang dimana mereka memerlukan lapangan pekerjaan yang untuk kelompok ini dan juga untuk tujuh juta warga yang menganggur lainnya. Solusi untuk kesengsaraan ini adalah rekonstruksi ekonomi. Selain manfaat nyata dari menciptakan lapangan kerja baru dan untuk memperkuat posisi fiskal Jepang, rekonstruksi ekonomi adalah pengalihan terapeutik yang menyalurkan energi negara untuk upaya produktif.²¹

Sehingga Jepang menggunakan bentuk diplomasi ekonomi yang diformulasikan oleh PM Shigeru Yoshida yakni yang dinamakan Yoshida *Doctrine* yang secara resmi di jalankan sejak tahun 1957 guna untuk merekonstruksi kekuatan ekonomi mereka. Pada saat itu proses kembali masuknya Jepang ke Asia Tenggara menitikberatkan pada aspek perekonomian yang

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

meliputi pembayaran rampasan perang dan juga kebutuhan Jepang akan raw materials dari negara-negara Asia Tenggara.

B. Lahirnya *Fukuda Doctrine*

Awal mula munculnya *Fukuda Doctrine* ini dipicu oleh peristiwa kedatangan PM Tanaka ke beberapa wilayah Asia Tenggara guna untuk memperbaiki hubungan antara Jepang dengan Asia Tenggara karena dari segi historis hubungan antara Jepang dengan Asia Tenggara kurang baik pasca perang dunia ke dua.

Berawal dari kunjungan PM Tanaka ke beberapa Negara di Asia Tenggara yaitu Filipina, Thailand, Malaysia, dan Indonesia mulai dari 7 hingga 17 Januari tahun 1974 Itu adalah kunjungan pertama oleh Perdana Menteri Jepang sejak tur Perdana Menteri Sato pada tahun 1967. Tujuh tahun adalah keabadian dalam hubungan luar negeri. Kunjungan Tanaka merupakan bencana dalam hal citra. Di Jakarta, ribuan siswa turun ke jalan sebagai protes. Dalam kerusuhan tersebut sebelas orang tewas dan di Indonesia peristiwa tersebut terkenal dengan nama peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari). Kedatangan Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka memicu demonstrasi mahasiswa karena dianggap sebagai penjajahan ulang Jepang terhadap Indonesia pada waktu itu.²² Di Bangkok pada saat di bandara ia diterima oleh para demonstrans dengan spanduk bertuliskan "Keluarlah imperialis yang jelek". Bahkan

²² Rahadian Rundjan, *loc.cit.*

ketika pertimbangan domestik bisa memicu sebagian protes, dan berdampak sangat penting bagi pembuat kebijakan Jepang.

Gambar 2. 2 Foto Perdana Menteri Takeo Fukuda



Sumber: Google.com

Tokyo's 1974 "*Diplomatic Bluebook*" menyatakan: "Kritik terhadap Jepang telah meningkat di berbagai Negara yang ada Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir terhadap peningkatan tekanan ekonomi yang sangat besar, metode bisnis perusahaan Jepang dan juga perilaku penduduk Jepang di negara-negara tersebut. Pada kesempatan kunjungan Perdana Menteri, para mahasiswa lokal menggelar demonstrasi dan

kerusuhan anti-Jepang di Bangkok dan Jakarta. Protes juga terjadi di Malaysia dan di tempat lain. "²³

Hingga pada tahun 1977 pada saat kunjungan Perdana Menteri Takeo *Fukuda* di Manila mendeklarasikan *Fukuda Doctrine*. Kebijakan *Fukuda Doctrine* menurut Michael Yuhuda merupakan inisiatif pertama Jepang yang paling ambisius setelah berakhirnya Perang Dunia II. ASEAN tidak saja ditempatkan sebagai kawasan paling penting bagi Jepang, tetapi juga sebagai “lahan” strategis Jepang untuk memainkan peranannya sebagai pemimpin Asia. Dimana *Fukuda Doctrine* ini merupakan sebagai wujud untuk memperbaiki citra Jepang di kawasan Asia Tenggara pasca kunjungan terakhir PM Tanaka ke Asia Tenggara yang di warnai oleh aksi demonstrasi.

Pada tanggal 18 Agustus 1977 di Manila yang merupakan pemberhentian terakhir atas kunjungan Perdana Menteri Takeo *Fukuda* di Asia Tenggara. Ia menyampaikan sebuah pidato penting kebijakan luar negeri Jepang terhadap wilayah tersebut, yang dimana menurut Toru Yano merupakan kali pertama semenjak perang dunia kedua Perdana Menteri Jepang melakukan presentasi yang sangat struktur dan sistematis mengenai pandangan terhadap hubungan dengan Asia

²³ Emilio de Miguel, (2013). *Japan And Southeast Asia: From The Fukuda Doctrine To Abe's Five Principles*. UNISCI.

Tenggara.²⁴ Poin utama dari pidato Perdana Menteri Takeo Fukuda adalah sebagai berikut:

- a) Pertama, Jepang, sebuah negara yang berkomitmen untuk perdamaian, menolak peran kekuatan militer, dan atas dasar itu diputuskan untuk berkontribusi pada perdamaian dan kemakmuran Asia Tenggara, dan komunitas dunia.
- b) Kedua, Jepang, sebagai teman sejati negara-negara Asia Tenggara, akan melakukan yang terbaik untuk mengkonsolidasikan hubungan rasa saling percaya dan kepercayaan berdasarkan pemahaman "hati ke hati" dengan negara-negara ini, dalam berbagai bidang yang mencakup tidak hanya bidang politik dan ekonomi tetapi juga bidang sosial dan budaya.
- c) Ketiga, Jepang akan menjadi mitra setara ASEAN dan negara-negara anggotanya, dan bekerja sama secara positif dengan mereka dalam upaya mereka sendiri untuk memperkuat solidaritas dan ketahanan mereka, bersama-sama dengan negara-negara lain yang memiliki pemikiran serupa di luar kawasan, sementara bertujuan untuk membina hubungan berdasarkan tentang saling pengertian dengan negara-negara Indocina, dan dengan demikian akan berkontribusi pada pembangunan

²⁴ Toru Yano. " *The "Fukuda Doctrine" And Its Implications For Southeast Asia: A Japanese Perspective.*" Southeast Asian Affairs, 1978, hal. 60-64.

perdamaian dan kemakmuran di seluruh Asia Tenggara.²⁵

Esensi dari isi *Fukuda Doctrine* antara lain ialah :

- a) Pertama yang mungkin merupakan poin paling penting adalah bertujuan untuk memecahkan hambatan psikologis yang ada antara Jepang dan negara-negara Asia Tenggara sebagai akibat dari perang dunia kedua. Fukuda menyatakan bahwa Jepang memiliki kemampuan dalam segi teknologi dan ekonomi bisa untuk mempersenjatai kembali dirinya dan bahkan bisa memproduksi senjata nuklir, namun Jepang memilih untuk tidak menjadi kekuatan militer. Pada mulanya, ini tampak sebagai pengulangan sederhana dari posisi yang dihadapi oleh Jepang yang muncul dari "pasifis" terkenal dari pasal 9 konstitusi saat ini. Tetapi yang lebih penting bagi orang-orang ASEAN, dan seluruh Asia Tenggara, yang ingatannya tentang agresi Jepang dalam perang dunia kedua masih jelas, berfungsi untuk meyakinkan kembali mereka bahwa Jepang tidak berniat untuk menjadi ancaman militer. Menariknya, ini mungkin dimasukkan sebagai poin pertama dan ditekankan secara sepihak sebagai hasil desakan oleh setidaknya satu kepala negara ASEAN.

²⁵ Virtual-Lab Yamakage, "Japan-ASEAN" (<http://yamakage-ken.com/citrus/projects/ASEAN/J-ASEAN/JAS19770807E%20Speech%20Fukuda.htm>, Diakses pada Januari 04, 2019).

- b) Kedua, Perdana Menteri menyerukan peningkatan rasa saling percaya diri dan kepercayaan antara Jepang dan ASEAN, ia menggunakan kata "hati ke hati" untuk menekankan hubungan yang harus dikembangkan, kata yang telah ia gunakan beberapa bulan sebelumnya dalam mendefinisikan hubungan baru antara Jepang dan tetangga-tetangganya di Asia
- c) Ketiga, dia mengatakan bahwa Jepang akan menjadi "mitra yang setara" dan "berjalan beriringan dengan ASEAN". Pilar terakhir ini tampaknya hanya merupakan penjabaran lebih lanjut dari poin kedua, yang menekankan bahwa Jepang tidak akan lagi berusaha menjadi anggota dominan dalam ranah Asia tetapi juga akan menerima anggota lain dari Asia sebagai mitra yang setara. Juga tersirat dalam pernyataan kesetaraan ini adalah keinginan untuk mengakhiri citra Jepang sebagai "*economic animal*".²⁶

Fukuda Doctrine kemudian menjadi tulang punggung kebijakan luar negeri Jepang terhadap ASEAN. Pada tahun yang sama ketika *Fukuda Doctrine* diumumkan, Jepang adalah negara pertama yang mengadakan pertemuan puncak bersama dengan para pemimpin ASEAN. Pertemuan Jepang - Menteri Luar Negeri ASEAN diadakan pada tahun berikutnya pada tahun 1978, dan Jepang adalah

²⁶ William W. Haddad, "*Japan, the Fukuda Doctrine, and ASEAN*". *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 2, No. 1, Juni 1980, hal. 10-11.

negara pertama yang membuka dialog untuk memulai hubungan kerja sama dengan ASEAN.²⁷

Untuk memenuhi janjinya ke ASEAN, Perdana Menteri Takeo Fukuda melanjutkan dengan menetapkan dua tujuan utama Jepang kepada asosiasi dan untuk memperingatkan tuan rumahnya bahwa ada dua masalah lain yang diharapkan oleh Jepang untuk dipahami oleh ASEAN. Mengenai aspek positif, Fukuda mengatakan bahwa Jepang akan merespons secara positif permintaan pinjaman ASEAN sebesar US\$1 miliar dolar untuk lima proyek intraregional utama yang mana telah direncanakan oleh para anggotanya. Lebih jauh, Jepang berjanji akan menggandakan pinjaman lebih dari Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) antara tahun fiskal 1977 dan 1982.²⁸

Namun Perdana Menteri Takeo Fukuda memperingatkan bahwa di dalam bidang perdagangan, Jepang tidak memiliki keinginan untuk membentuk blok eksklusif dengan ASEAN. Dia berpendapat bahwa Jepang merupakan negara terbesar ketiga yang memiliki produk nasional bruto (GNP) di dunia, merupakan tanggung jawab yang tidak dapat dihindarkan di luar Asia. Oleh karena itu Jepang tidak memihak blok ekonomi manapun. Blok seperti itu akan melawan kepentingan Jepang dan bahkan bisa bertentangan dengan kepentingan ASEAN, karena para

²⁷ ASJA International, “*Fukuda Doctrine*” (<https://asja.gr.jp/en/asja/fukuda.html>, Diakses pada 27 Januari 2019).

²⁸ William W. Haddad, *loc.cit*

anggotanya berusaha untuk memperluas pasar ekspor mereka. Bagian dari pidato Perdana Menteri Takeo Fukuda ini tampaknya merupakan peringatan ringan bagi ASEAN untuk tidak membentuk blok ekonomi, sesuatu yang mengkhawatirkan bagi para pemimpin Jepang. Dikatakan bahwa pembentukan blok ekonomi eksklusif hanya mendorong pembentukan blok lain di seluruh dunia.²⁹

Fukuda memuji pernyataan di dalam KTT ASEAN yang bertempat di Kuala Lumpur di mana para anggota mengatakan mereka ingin membangun hubungan yang damai dengan semua negara di Asia Tenggara. Ini tampaknya sangat penting bagi Jepang karena Jepang memandang hubungannya dengan Asia Tenggara, tidak secara eksklusif hanya dalam hal ASEAN dan Burma saja, namun juga bersama dengan tiga negara komunis yang ada di Indocina. Fukuda pada dasarnya mendesak anggota ASEAN untuk tidak terlalu takut pada Vietnam (Laos dan juga Kamboja) dan untuk mencoba membangun hubungan diplomatik yang normal dengan semua negara sebagai sarana stabilisasi regional setelah dua dekade atau akan muncul lebih banyak perang yang akan terjadi.

Ketika kita mendiskusikan mengapa penting bagi Jepang untuk mengumumkan *Fukuda Doctrine* pada tahun 1977 dan itu sangat menguntungkan bagi Jepang, tidak cukup untuk berbicara tentang sebab-sebab sosial. Seseorang juga harus mempertimbangkan aspek ekonomi, politik, dan militer. Sampai baru-baru ini, juru bicara

²⁹*Ibid.*

kementerian luar negeri Jepang mengatakan, itu keamanan ASEAN dulu dianggap murni militer. Dia berpendapat bahwa ini adalah akibat dari konflik antara Timur dan Barat. Tapi setelah "pembebasan" Vietnam dan jatuhnya Kamboja ke komunis, dikombinasikan dengan penarikan Pasukan Amerika dari Asia Tenggara dan, pada tingkat lebih rendah, dari Korea Selatan, sebuah definisi ulang keamanan harus dikembangkan. Ini redefinisi keamanan di ASEAN, dari militer ke ekonomi satu, memungkinkan Jepang untuk menawarkan layanannya untuk meningkatkan standar hidup masyarakat Asia Tenggara.

Jepang bukan kekuatan militer karena konstitusinya dan mungkin tidak akan menjadi kekuatan militer dalam waktu ini. Selama keamanan didefinisikan dalam istilah militer secara umum, Jepang tidak memiliki peran. Tetapi dengan kenyataan yang baru muncul pada tahun 1975, negara-negara ASEAN mulai merasakan keamanan bagi mereka sendiri dalam hal meningkatkan standar hidup rakyat mereka, sehingga pemerintah mendapatkan dukungan dari rakyat yang ada.³⁰

C. Kerjasama Jepang dengan ASEAN pasca terbentuknya *Fukuda Doctrine*

Kerjasama antara Jepang dan ASEAN sebelum Perang Dingin berakhir lebih mengutamakan perbaikan hubungan dengan cara menyalurkan bantuan dan memberikan hasil rampasan perang kepada negara-negara yang pernah dijajah oleh Jepang pada saat Perang Dunia II. Awalnya, pendekatan

³⁰ William W. Haddad, *Op.Cit.*, hal 14.

Jepang didasarkan pada interaksi bilateral karena keadaan politik dan ekonomi negara-negara Asia Tenggara yang berbeda. Namun, setelah ASEAN didirikan pada tahun 1967 dan mengambil pendekatan yang lebih bersatu untuk politik internasional, Jepang mulai bernegosiasi langsung dengan lembaga multilateral. Pada tahun 1970-an, pengaruh ekonomi Jepang yang meningkat di Asia Tenggara dan sekitarnya menciptakan ketakutan bahwa Jepang akan berusaha untuk menghidupkan kembali "Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya" yang lainnya.³¹

Oleh karena berkat adanya *Fukuda Doctrine* sampai sekarang ini sudah banyak macam kerja sama yang sudah dilakukan oleh Jepang terhadap ASEAN. Dulu pada saat dibentuknya doktrin ini pada saat Perang Dingin yang hanya bertujuan untuk memperbaiki citra Jepang di mata negara Asia Tenggara. Namun hingga pasca Perang Dingin usai Jepang yang berlandaskan *Fukuda Doctrine* memperluas ruang lingkup kerja samanya dengan ASEAN tidak hanya dalam ranah ekonomi, tetapi juga mencakup sosial, kebudayaan, dll. kepada ASEAN. Tiap tahun berlangsung pertukaran (*exchange*), baik di tingkat puncak maupun tingkat menteri, seperti KTT Jepang-ASEAN, PMC, AEM-METI, dan sebagainya guna membangun hubungan baik antara Jepang dan ASEAN.

Dalam hal ini kerja sama Jepang dan ASEAN di bagi kedalam dua kelompok yakni kerja sama Bilateral dengan negara anggota ASEAN dan Multilateral antara Jepang dan ASEAN sebagai organisasi di Asia Tenggara.

³¹ ASEAN Secretariat, "*Joint Communique of the Sixth ASEAN Ministerial Meeting*" (press release, Pattaya, Thailand, April 18, 1973).

1. Kerja sama Bilateral

Kerja sama bilateral yang dilakukan Jepang dengan negara ASEAN sebelum berakhirnya Perang Dingin hampir mencakup seluruh negara-negara anggota ASEAN diantaranya ialah Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja. Meskipun Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja bergabung dengan ASEAN pada saat Perang Dingin usai akan tetapi Jepang sudah menjalin hubungan dengan negara-negara tersebut sebelum berakhirnya Perang Dingin.³²

Salah satu kerja sama bilateral Jepang dengan ASEAN diantaranya adalah kerja sama antara Indonesia dan Jepang diawali dengan ditanda tangannya perjanjian perdamaian pada tahun 1958.³³ Beberapa kerja sama yang terjadi pada saat Perang Dingin masih berlangsung antara Jepang dengan Indonesia diantaranya ialah ditanda tangannya “*Treaty of Amity and Commerce*” (TAC) pada tanggal 1 Juli 1961 di Tokyo. Kemudian setahun setelah ditanda tangannya TAC kemudian dibentuknya “Perjanjian Hubungan Udara”, “Kerja sama dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”, “Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda”.³⁴

Filipina, Malaysia, Singapura, dan Brunei kerja sama bilateral ke empat negara tersebut dengan Jepang bisa dibilang

³² Mofa, “*Japan-Asia Relations*”(<https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/index.html>, Diakses pada 20 Februari 2019).

³³ *Ibid.*

³⁴ Kemlu, “*Kerja Sama Bilateral*”(<https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/detail-kerjasama-bilateral.aspx?id=56>, Diakses pada 20 Februari 2019).

berkembang pada saat pasca Perang Dingin berakhir. Karena masing-masing negara tersebut memiliki kendala tersendiri bagi Jepang untuk memperluas kerja samanya dengan negara-negara tersebut, namun Jepang tetap berkontribusi terhadap hubungan bilateralnya terhadap keempat negara tersebut dengan menyalurkan bantuan dana berupa ODA. Kemudian untuk negara yang berideologi komunis seperti Vietnam, Myanmar, Kamboja pada saat Perang Dingin masih berlangsung Jepang sudah membangun hubungan diplomatis dengan negara-negara ini, namun kerja sama yang dilakukan masih terbatas. Negara-negara ini juga baru bergabung ASEAN setelah Perang Dingin usai.

Tabel 2.1 OUTLINE OF ODA EXPANSION PLAN

OUTLINE OF ODA EXPANSION PLAN (Unit: ¥ 1 billion)						
Fiscal Year	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Case I	548.5	630.8	725.4	834.2	959.3	1,103.2
Grants	228.5	282.0	351.8	439.6	540.1	661.9
Bilateral grants	74.5	124.3	170.4	231.0	300.3	386.1
Investments in and contributions to international organs	154.0	157.7	181.4	208.6	239.8	275.8
Loans	320.0	348.8	373.6	394.6	419.2	441.3
Quality of aid (grants as a proportion of Total Aid)	41.6%	44.7%	48.5%	52.7%	56.3%	60.0%
Ratio (%) to GNP for whole year	0.24%	0.25%	0.26%	0.26%	0.29%	0.29%
Case II	548.5	658.2	789.8	947.8	1,137.4	1,364.9
Grants	228.5	294.2	383.1	499.5	640.4	818.9
Bilateral grants	74.5	129.6	185.6	262.5	356.0	477.7
Investments in and contributions to international organs	154.0	164.6	197.5	237.0	284.4	341.2
Loans	320.0	364.0	406.7	448.3	497.0	546.0
Quality of aid (grants as a proportion of Total Aid)	41.6%	44.7%	48.5%	52.7%	56.3%	60.0%
Ratio (%) to GNP for whole year	0.24%	0.26%	0.28%	0.30%	0.34%	0.36%

Source: Adapted with modifications from *Nihon Keizai*, 21 Sept. 1977

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kerja sama bilateral yang dilakukan Jepang dengan negara-negara dalam memberikan bantuan investasi berupa ODA, dari tahun 1977 hingga tahun 1982 tiap tahunnya mengalami peningkatan baik dari kualitas maupun rasion kepada GNP untuk setahun penuh.

2. Kerja sama Multilateral

Asean dan Jepang memiliki kerja sama yang bersifat multilateral sejak Perang Dingin belum usai yang dimana paada 1973 disepakati adanya hubungan kemitraan antara Jepang

dengan ASEAN dalam bidang karet sintetis atau yang lebih dikenal dengan *Japan-ASEAN Ministerial Conference on Synthetic Rubber* yang merupakan awal dari kerja sama Jepang dengan ASEAN.³⁵

Kemudian pada tahun 1977 diadakannya ASEAN-Japan Forum yang dimana pertemuan tersebut dihadiri oleh Delegasi Jepang dipimpin oleh Mr. Yosuke Nakae, Direktur Jenderal, Biro Urusan Asia, Kementerian Luar Negeri, sementara Delegasi ASEAN sebelumnya dipimpin oleh Mr. Umarjadi Njotowijono, Direktur Jenderal, ASEAN-Indonesia, Datuk Ali Abdullah Direktur Jenderal ASEAN-Malaysia, Duta Besar Modesto Farolan, Direktur Jenderal ASEAN-Filipina, Mr Tan Boon Seng, Direktur Jenderal ASEAN-Singapura, dan Mr. Nissai Vejajjiva, Direktur Jenderal, ASEAN-Thailand. Tn. Hartono Rekso Dharsono, Sekretaris Jenderal ASEAN juga hadir. Bapak Umarjadi Njotowijono, Direktur Jenderal, ASEAN-Indonesia, adalah Juru Bicara ASEAN pada Pertemuan tersebut.³⁶

Pertemuan tersebut menandai formalisasi Forum ASEAN-Jepang, yang dipercayakan dengan tugas meninjau, memantau, dan merekomendasikan langkah-langkah untuk memperkuat

³⁵ JAIF, “*Milestones of ASEAN-JAPAN Friendship and Cooperation*” (<https://jaif.asean.org/milestones.html>, Diakses pada 5 Maret 2019).

³⁶ ASEAN, “*First ASEAN-Japan Forum*” (https://asean.org/?static_post=joint-press-release-of-the-first-asean-japan-forum-jakarta-23-march-1977, Diakses pada 5 Maret 2019)

dan memperluas kerja sama antara ASEAN dan Jepang, khususnya di bidang pengembangan industri, perdagangan, serta pangan dan pertanian. Delegasi Jepang menyatakan dukungan Jepang terhadap ASEAN untuk mengembangkan ketahanan regional dan kesediaan untuk membantu mempercepat pembangunan ekonomi ASEAN. Kemudian dalam pertemuan tersebut Delegasi ASEAN menyampaikan apresiasinya atas kemajuan yang dibuat dalam *Japan-ASEAN Ministerial Conference on Synthetic Rubber*.³⁷

Kesimpulannya adalah Jepang pada saat Perang Dingin masih berlangsung, dalam melakukan kerja sama dengan ASEAN baik itu dalam kerja sama bilateral ataupun multilateral cakupan kerja sama yang dilakukan Jepang cakupannya masih belum luas. Dalam hubungan bilateral dengan negara-negara anggota ASEAN hubungan bilateral yang dilakukan Jepang sebelum Perang Dingin usai ialah hanya sebatas kerja sama dalam bidang ekonomi dalam hal penyaluran dana untuk negara-negara tersebut. Karena untuk dapat memperluas cakupan kerja sama Jepang pada saat itu mengalami kendala karena masih adanya blok timur dan blok barat yang sedang berkonflik ketika itu, dan beberapa negara anggota ASEAN beraliansi dengan salah satu dari kedua blok tersebut.

³⁷ ASEAN, “First ASEAN-Japan Forum”(https://asean.org/?static_post=joint-press-release-of-the-first-asean-japan-forum-jakarta-23-march-1977, Diakses 5 Maret 2019).